
Tubuh, Pekerjaan, dan Pilihan Perempuan Jawa dalam Cengkraman Patriarki dan Kapitalisme

Syahr Banu

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia
Korespondensi: syaharbanuabdullah@gmail.com

Abstract

Women's bodies in Javanese society are often positioned not as personal property but as objects of social regulation legitimized by cultural norms. This study examines how patriarchy and capitalism operate simultaneously in shaping the bodies, work, and life choices of Javanese women, producing gender inequalities that are historical and structural in nature. This research employs a qualitative approach through historical and social analysis by examining historical sources and the contemporary social experiences of Javanese women. The findings show that women's bodies function as political and economic arenas in which marriage norms, gender-based divisions of labor, and idealized body standards become key mechanisms of social control. These findings demonstrate that the inequalities experienced by Javanese women are not cultural givens but the result of historical processes continuously reproduced through cultural symbolism and capitalist logic. These processes restrict women's autonomy in education, employment, and life decision-making within everyday social relations and layered power structures in contemporary Javanese society today.

Keywords: Javanese Women, Patriarchy, Capitalism, Body, Labor

Abstrak

Tubuh perempuan dalam masyarakat Jawa sering diposisikan bukan sebagai milik personal, melainkan sebagai objek regulasi sosial yang dilegitimasi oleh norma budaya. Penelitian ini mengkaji bagaimana patriarki dan kapitalisme bekerja secara simultan dalam membentuk tubuh, pekerjaan, dan pilihan hidup perempuan Jawa, sehingga menghasilkan ketimpangan gender yang bersifat historis dan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis historis dan sosial dengan menelaah sumber-sumber sejarah serta pengalaman sosial perempuan Jawa kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh perempuan berfungsi sebagai arena politik dan ekonomi, di mana norma pernikahan, pembagian kerja berbasis gender, dan standar tubuh ideal menjadi mekanisme utama kontrol sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang dialami perempuan Jawa bukanlah kodrat budaya, melainkan hasil dari proses historis yang terus direproduksi melalui simbolisme budaya dan logika kapitalisme. Proses tersebut membatasi otonomi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan hidup dalam relasi sosial sehari-hari dalam masyarakat Jawa kontemporer modern.

Kata Kunci: Perempuan Jawa, Patriarki, Kapitalisme, Tubuh, Pekerjaan

PENDAHULUAN

Dalam praktik sosial, kebebasan atas tubuh tidak diperlakukan secara setara, melainkan dibaca melalui lensa jenis kelamin (Bordo, 1993: 143). Kondisi ini membuat pengalaman perempuan atas tubuhnya berbeda secara struktural dibandingkan laki-laki, sehingga kedaulatan tubuh tidak dinikmati secara merata oleh setiap gender. Secara historis, perempuan ditempatkan pada posisi di mana tubuhnya menjadi objek penilaian dan kontrol sosial, baik melalui institusi keluarga, norma budaya, maupun legitimasi agama.

Praktik kontrol atas tubuh perempuan mencerminkan relasi kuasa yang bekerja secara politis, di mana perempuan dikonstruksikan sebagai simbol kesucian, kehormatan keluarga, sekaligus alat reproduksi yang harus dijaga dan dikendalikan. Karena perempuan dikonstruksikan sebagai simbol kesucian dan alat reproduksi, justru tubuh perempuan menjadi sasaran kontrol pihak lain padahal seharusnya konstruksi tersebut mendorong pengakuan atas kedaulatan perempuan atas tubuhnya sendiri. Aktor individu maupun institusi sosial merasa memiliki legitimasi untuk mengontrol tubuh yang pada gilirannya melemahkan otonomi dan eksistensi perempuan (Saptandari, 2013: 54)

Dalam masyarakat Jawa, kesucian dan kehormatan keluarga dikonstruksikan menjadi penanda moral yang harus dijaga oleh keluarga dan komunitas. Salah satu bentuk kontrol paling mendasar atas tubuh perempuan muncul ketika perempuan memasuki usia dewasa. Temuan awal menunjukkan adanya stigma kuat bahwa perempuan harus segera menikah agar tidak dicap sebagai "perawan tua". Tekanan semacam ini memperlihatkan bagaimana pernikahan diposisikan oleh masyarakat bukan sebagai hak individual, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk mengatur tubuh dan kehidupan perempuan (Nugroho, 2020: 47-48).

Namun dalam praktiknya, norma sosial justru membatasi ruang otonomi perempuan dengan menetapkan standar tertentu atas tubuh mereka. Setelah menikah, bentuk tekanan tidak berhenti; tuntutan untuk segera memiliki keturunan menjadi lapisan kontrol berikutnya, tidak hanya menyangkut pilihan hidup, tetapi terkait dengan konstruksi tentang "kesempurnaan perempuan", di mana nilai seorang perempuan diukur melalui kepatuhan terhadap ekspektasi sosial tersebut (Saptandari, 2013: 204-205). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana patriarki dan kapitalisme bekerja secara simultan membentuk tubuh, pekerjaan, dan pilihan hidup perempuan Jawa secara historis dan kontemporer.

Beberapa penelitian telah mengkaji relasi antara patriarki, kapitalisme, dan pengalaman perempuan, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Septiana et al. (2025) menunjukkan bahwa kapitalisme dan patriarki bekerja simultan menciptakan beban ganda bagi perempuan pekerja formal, namun kajiannya tidak menyentuh dimensi historis maupun konteks perempuan Jawa secara spesifik. Nashihah dan Maunah (2025) menganalisis stratifikasi gender dalam kosmologi Jawa tradisional dengan kerangka habitus Bourdieu, namun tidak menelusuri bagaimana konstruksi tersebut terus direproduksi dalam pengalaman perempuan masa kini. Sementara itu, Al Huda et al. (2026) membaca patriarki Jawa melalui representasi sinematik film Kartini tanpa basis data empiris dari perempuan Jawa kontemporer. Dengan demikian, belum ada penelitian yang secara eksplisit menghubungkan konstruksi historis tubuh, pekerjaan, dan pilihan hidup perempuan Jawa dengan pengalaman perempuan kontemporer dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini menggunakan feminisme kritis sebagai perspektif payung karena memungkinkan pembacaan terhadap pengalaman perempuan tidak hanya pada tataran kultural, tetapi juga pada tataran struktural dan historis yang membentuknya. Dalam kerangka ini, tiga teori utama dioperasionalkan secara spesifik. Pertama, teori politik tubuh Foucault (1995) dan Bartky (1990) digunakan untuk membaca mekanisme disiplin dan normalisasi tubuh perempuan Jawa, dan dioperasionalkan pada sub bab "Konstruksi Tubuh Perempuan Jawa dalam Cengkraman Patriarki dan Kapitalisme". Kedua, feminisme Marxis Hartmann (1981) dan Tong (2010) digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara patriarki dan kapitalisme dalam mereproduksi subordinasi perempuan melalui pembagian kerja dan ketimpangan upah, dan dioperasionalkan pada sub bab "Pembagian Peran Domestik dan Publik Perempuan Jawa". Ketiga,

perspektif pascakolonial Federici (2018) dan Fraser (2016) digunakan untuk membaca bagaimana struktur tersebut membatasi pilihan hidup perempuan Jawa kontemporer, dan dioperasionalkan pada subbab “Pilihan Hidup Perempuan Jawa: Pendidikan, Pekerjaan, dan Pernikahan”. Secara spesifik, penelitian ini berkontribusi dalam tiga hal: pertama, menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi historis dan kontemporer dalam satu kajian; kedua, menempatkan tubuh perempuan Jawa sebagai titik awal analisis yang menghubungkan patriarki dan kapitalisme secara simultan; ketiga, menghadirkan data empiris kontemporer dari perempuan Jawa sebagai cermin reproduksi konstruksi historis yang selama ini hanya dikaji secara terpisah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan bagaimana konstruksi patriarki dan kapitalisme yang terbentuk secara historis sejak periode pra-kolonial hingga kolonial masih tereproduksi dalam pengalaman perempuan Jawa kontemporer. Secara spesifik: (1) menganalisis bagaimana patriarki dan kapitalisme membentuk konstruksi sosial atas tubuh perempuan Jawa secara historis dan kontemporer; (2) mendeskripsikan bagaimana relasi antara budaya Jawa dan patriarki membatasi peran domestik dan publik perempuan Jawa; serta (3) mengidentifikasi bagaimana struktur budaya Jawa, patriarki, dan kapitalisme membatasi pilihan hidup perempuan Jawa dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan sebagaimana tercermin dalam pengalaman perempuan masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada analisis historis dan sosial, serta didukung oleh data kuantitatif deskriptif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri konstruksi tubuh, peran, dan posisi perempuan Jawa dalam struktur budaya dan kekuasaan sejak periode pra-kolonial hingga kolonial. Sementara itu, pendekatan sosial digunakan untuk membaca keterkaitan antara patriarki, kapitalisme, dan kolonialisme dalam membentuk pengalaman perempuan Jawa. Data survei digunakan sebagai ilustrasi pengalaman sosial dan tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memahami pola relasi patriarki dan kapitalisme dalam konteks sosial tertentu.

Data primer diperoleh melalui survei daring yang melibatkan 50 responden perempuan Jawa dengan menggunakan kuesioner terstruktur, yang memuat pertanyaan tertutup berbasis skala penilaian 1–5 (tidak setuju–setuju) serta pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman dan pandangan responden. Data primer berupa survei daring tidak dimaksudkan sebagai alat generalisasi, melainkan sebagai cermin pengalaman kontemporer yang digunakan untuk menelusuri apakah konstruksi historis patriarki dan kapitalisme masih tereproduksi dalam kehidupan perempuan Jawa masa kini. Dengan demikian, hubungan antara data historis dan data survei bersifat dialektis: data historis menunjukkan bagaimana konstruksi tubuh, pekerjaan, dan pilihan hidup perempuan Jawa terbentuk (*das sollen*), sementara data survei merekam bagaimana konstruksi tersebut masih dirasakan dan dihidupi oleh perempuan Jawa kontemporer (*das sein*). Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa literatur akademik dan sumber-sumber historis, seperti arsip dan kajian sejarah perempuan Jawa. Feminisme kritis dipilih sebagai perspektif payung karena memungkinkan pembacaan terhadap pengalaman perempuan tidak hanya pada tataran kultural, tetapi juga pada tataran struktural dan historis yang membentuknya. Oleh karena itu, data survei tidak dianalisis secara statistik inferensial, melainkan dibaca secara interpretatif untuk melihat apakah pola yang ditemukan dalam konstruksi historis masih terefleksi dalam pengalaman perempuan Jawa masa kini. Teori politik

tubuh Foucault dan Bartky dioperasionalkan pada subbab 2.2, kerangka feminisme Marxis Hartmann dan Tong pada subbab 2.3, serta perspektif pascakolonial Federici dan Fraser pada subbab 2.4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini difokuskan pada bagaimana politik tubuh, patriarki, dan kapitalisme bekerja secara konkret dalam pengalaman hidup perempuan Jawa, khususnya dalam relasi tubuh, pekerjaan, dan pengambilan keputusan hidup.

Analisis Historis Perempuan Jawa

Dengan Bagian ini menjadi fondasi analisis dengan menelusuri bagaimana tubuh dan peran perempuan Jawa dikonstruksi dalam relasi kuasa sejak periode pra-kolonial hingga kolonial. Analisis historis perempuan Jawa dalam penelitian ini bertujuan menelusuri bagaimana tubuh dan peran perempuan dikonstruksi dalam relasi kuasa sejak periode pra-kolonial hingga kolonial. Pemilihan figur perempuan dalam sejarah Jawa tidak dimaksudkan untuk mengidealkan peran mereka, melainkan untuk membaca bagaimana tubuh perempuan dimobilisasi, dikendalikan, dan dimaknai sebagai bagian dari strategi politik, sosial, dan budaya dalam struktur patriarki. Dengan menempatkan pengalaman historis perempuan sebagai bagian dari analisis, bagian ini menjadi landasan untuk memahami kesinambungan praktik pengendalian terhadap tubuh, pekerjaan, dan pilihan hidup perempuan Jawa hingga konteks kontemporer.

Dalam budaya Jawa, pendidikan sejak lama diposisikan sebagai hal yang kurang penting bagi perempuan (Yuniarti, 2018: 157), dan anggapan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan formal dinormalisasi hingga periode kolonial (Widyarningsih, 2010: 100). Upaya mengubah paradigma tersebut muncul melalui gagasan Raden Ajeng Kartini tentang pendidikan perempuan. Namun, representasi Kartini dalam historiografi tidak sepenuhnya utuh karena surat-suratnya telah melalui proses seleksi dan penyuntingan oleh J.H. Abendanon, sehingga pemikiran Kartini yang dikenal publik merupakan hasil konstruksi tertentu (Carey & Houben, 2016: 21). Kondisi ini mencerminkan bagaimana peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah kerap tereduksi akibat keterbatasan akses dan kontrol atas produksi pengetahuan.

Pandangan bahwa perempuan sebaiknya berada di ranah domestik dilegitimasi oleh sistem patriarki yang menganggap perempuan memiliki kapabilitas alami dalam mengurus rumah tangga. Norma ini membatasi peran perempuan pada ruang privat dan mengabaikan potensi mereka dalam ruang publik. Meskipun dalam konteks tertentu keterlibatan perempuan dalam konflik dan peperangan memperoleh dukungan, keterlibatan tersebut tetap berada dalam kerangka kekuasaan patriarkal. Pendidikan menjadi pondasi penting bagi kesejahteraan perempuan karena berkaitan dengan pengelolaan pangan, kesehatan, ekonomi, dan pengasuhan. Namun, budaya feodal Jawa tetap menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan membatasi kebebasan mereka di ruang publik (Lailiyah, 2017: 84-85), menunjukkan sinergi antara kebudayaan lokal dan patriarki kolonial dalam menekan perempuan.

Perubahan politik pada tahun 1799, ditandai dengan runtuhnya VOC dan pengalihan kekuasaan kepada Hindia Belanda, membawa implikasi terhadap kebijakan pendidikan. Penerapan sistem Tanam Paksa mendorong penyediaan pendidikan bagi laki-laki pribumi demi menjaga stabilitas ekonomi kolonial. Sebaliknya, pendidikan bagi perempuan tidak dikembangkan secara setara, baik dari segi akses maupun tujuan. Pendidikan perempuan diarahkan untuk mendukung peran domestik dan kepentingan kolonial, serta hanya

diperuntukkan bagi kalangan ningrat dan priyayi (Adji, 2017: 34-36). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum dipahami sebagai hak dasar perempuan, melainkan sebagai instrumen pelestarian struktur patriarki.

Sebagai respons atas keterbatasan ruang publik bagi perempuan, pers menjadi medium alternatif bagi perempuan elite untuk menyuarakan gagasan dan kritik sosial. Tokoh-tokoh perempuan dari kalangan ningrat, termasuk R.A. Kartini, memanfaatkan pers sebagai sarana perjuangan pendidikan perempuan. Dalam norma sosial yang menuntut perempuan bersikap lembut dan tidak tampil sebagai orator di ruang publik, tulisan menjadi bentuk perlawanan yang lebih dapat diterima secara sosial (Lailiyah, 2017: 87-88).

Dalam lintasan sejarah, perempuan Jawa mengalami pembatasan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan politik sebagai akibat kerja simultan feodalisme Jawa dan kolonialisme. Dalam struktur politik kerajaan Jawa, khususnya pada masa Mataram Islam, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui peperangan, tetapi juga melalui strategi kultural yang melibatkan perempuan. Kisah Retno Pembayun menjadi contoh konkret bagaimana tubuh dan peran perempuan dimobilisasi sebagai bagian dari strategi politik dan perluasan kekuasaan.

Retno Pembayun: Tubuh Perempuan sebagai Strategi Politik

Pada masa Kerajaan Mataram Islam, struktur politik bersifat patrimonial dengan kepemimpinan yang berpusat pada otoritas laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama (Moedjanto, 1987: 83). Dalam sistem ini, perempuan tidak memiliki kewenangan formal dalam ranah politik, meskipun perannya kerap hadir dalam praktik kekuasaan yang tidak selalu tercatat secara eksplisit dalam historiografi resmi. Keberadaan perempuan dalam ruang politik bersifat tidak terlihat, namun tetap memiliki fungsi strategis dalam dinamika kekuasaan kerajaan.

Salah satu figur perempuan tersebut adalah Retno Pembayun, putri Panembahan Senopati, yang berasal dari kalangan bangsawan dan memiliki posisi penting dalam konteks politik Mataram Islam. Retno Pembayun menghadapi stigma gender sebagai perempuan yang dianggap tidak layak terlibat dalam urusan politik dan kekuasaan. Namun, Panembahan Senopati memercayainya untuk menjalankan misi politik berupa penyusupan sebagai bagian dari strategi perluasan wilayah kekuasaan Mataram.

Dalam konflik dengan Ki Ageng Mangir, Panembahan Senopati memilih pendekatan politik non-militer dengan memanfaatkan peran perempuan sebagai medium penaklukan melalui hubungan personal dan kedekatan emosional. Retno Pembayun menjalankan peran tersebut dengan menyamar sebagai penari bernama Lara Kasihan dan berhasil menarik perhatian Ki Ageng Mangir hingga berujung pada pernikahan sebagai bagian dari strategi politik kerajaan (Mardhiah et al., 2023: 13).

Keberhasilan strategi ini menunjukkan bahwa tubuh dan peran perempuan memiliki nilai politik dalam struktur kekuasaan Jawa. Namun, kapasitas tersebut tetap beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh otoritas patriarkal, di mana perempuan diposisikan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Dengan demikian, mobilisasi tubuh perempuan dalam strategi politik kerajaan justru memperlihatkan bagaimana relasi kuasa patriarki direproduksi melalui praktik kekuasaan. Pola mobilisasi tubuh perempuan sebagai instrumen kepentingan pihak lain ini tidak berhenti pada masa kerajaan. Dalam konteks kontemporer, mekanisme serupa bekerja melalui norma sosial yang menempatkan tubuh dan pilihan hidup perempuan sebagai urusan kolektif, bukan individual.

Nyi Ageng Serang: Kepemimpinan dan Perlawanan Militer Perempuan Jawa

Nyi Ageng Serang merupakan figur perempuan Jawa yang terlibat dalam perlawanan bersenjata pada masa Perang Diponegoro. Ia adalah putri Pangeran Ronggo Seda Jajar atau Panembahan Senopati Notoprojo, seorang tokoh perlawanan yang gugur dalam konflik bersenjata melawan kekuatan kolonial Belanda (Ricklefs, 1973, sebagaimana dikutip dalam Carey & Houben, 2016: 379). Latar belakang genealogis ini menunjukkan bahwa keterlibatan Nyi Ageng Serang dalam perlawanan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial-politik tempat ia dibesarkan.

Pasca-Perjanjian Giyanti, eksploitasi ekonomi dan politik oleh Belanda memperburuk kondisi sosial masyarakat, termasuk perempuan. Dalam situasi tersebut, perempuan tidak sepenuhnya berada di luar ruang konflik, meskipun keterlibatan mereka tetap berada dalam batasan struktur patriarki dan legitimasi sosial tertentu. Setelah gugurnya ayahnya, Nyi Ageng Serang semakin terlibat dalam perlawanan, dan pengalaman tersebut berperan dalam membentuk kesadaran politik serta keterlibatannya dalam dinamika konflik (Dari et al., 2021: 187).

Keterlibatan Nyi Ageng Serang dalam kepemimpinan militer tidak serta-merta menunjukkan kesetaraan gender dalam struktur kekuasaan Jawa. Partisipasi perempuan dalam konteks ini bersifat situasional dan bergantung pada kondisi politik yang mendesak, serta legitimasi yang diperoleh melalui relasi keluarga dan status sosial. Perempuan tidak ditempatkan sebagai pemegang otoritas formal, melainkan berperan dalam kerangka perlawanan yang tetap didominasi oleh kepemimpinan laki-laki.

Hubungan pernikahan Nyi Ageng Serang dengan Sultan Hamengkubuwana II juga memperlihatkan bagaimana tubuh dan posisi perempuan berada dalam persilangan antara kepentingan politik, kekuasaan, dan relasi personal. Meskipun Nyi Ageng Serang menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan strategis, posisinya tetap berada dalam batasan struktur patriarki yang membatasi pengakuan institusional terhadap kepemimpinan perempuan. Partisipasi situasional yang bergantung pada legitimasi relasi keluarga ini mencerminkan pola yang masih ditemukan dalam data kontemporer, di mana pengaruh pengambilan keputusan perempuan Jawa masih sangat bergantung pada figur otoritas baik orang tua, suami, maupun saudara sebagaimana ditunjukkan oleh temuan survei penelitian ini.

Budaya Jawa, Patriarki, dan Normalisasi Subordinasi Perempuan

Selama masa penjajahan, kedudukan perempuan Jawa tidak mengalami perubahan signifikan dalam struktur sosial maupun relasi kuasa gender. Praktik poligami dan sistem selir dilembagakan sebagai bagian dari strategi kekuasaan keraton, yang secara sistematis menempatkan tubuh perempuan dalam kepentingan reproduksi politik dan legitimasi kekuasaan laki-laki (Carey & Houben, 2016: 118-119). Dalam konteks ini, perempuan tidak diposisikan sebagai subjek otonom, melainkan sebagai instrumen yang keberadaannya diatur oleh kepentingan elite.

Konsep macak, masak, dan manak melekat kuat pada perempuan Jawa dan berfungsi membatasi ruang gerak mereka, terutama dalam akses terhadap pendidikan, pengembangan diri, dan peran publik yang lebih luas (Nugroho, 2020: 42). Nilai-nilai tersebut dilegitimasi sebagai bagian dari tradisi dan moralitas, sehingga subordinasi perempuan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan.

Budaya Jawa berperan sebagai perangkat ideologis yang melegitimasi relasi kuasa patriarki dan membingkai ketimpangan gender sebagai tatanan sosial yang alamiah. Nilai-nilai budaya tersebut diwariskan lintas generasi dan berfungsi menormalisasi pembagian peran berbasis gender dalam kehidupan sehari-hari.

Keterlibatan perempuan dalam struktur militer, seperti pembentukan kelompok prajurit perempuan pada masa Mangkunegara I dan Sultan Hamengkubuwana II, tidak serta-merta menandai perubahan relasi gender yang mendasar. Partisipasi tersebut bersifat terbatas dan simbolik, karena perempuan hanya diakomodasi sejauh tidak mengganggu hirarki patriarki yang telah mapan (Yuliarni et al., 2020: 105).

Selain dalam ranah politik dan militer, kontrol terhadap tubuh perempuan juga berlangsung melalui konstruksi standar kecantikan dan representasi tubuh ideal yang dilekatkan secara sosial dan kultural. Standarisasi ini :menghasilkan tekanan sosial yang berkelanjutan dan memengaruhi cara perempuan memandang tubuh serta identitas dirinya. Dengan demikian, tubuh perempuan menjadi lokasi utama disiplin sosial yang menundukkan perempuan melalui pengawasan dan penilaian moral (Frederick et al., 2008: 142-143). Konstruksi historis inilah yang menjadi fondasi bagi mekanisme kontrol tubuh, peran, dan pilihan hidup perempuan Jawa yang masih dapat ditelusuri dalam pengalaman kontemporer, sebagaimana diuraikan pada subbab berikut.

Konstruksi Tubuh Perempuan Jawa dalam Cengkaman Patriarki dan Kapitalisme

Dinamika tekanan sosial yang dialami perempuan Jawa tidak dapat dilepaskan dari cara kekuasaan bekerja melalui tubuh. Untuk memahami mekanisme tersebut, diperlukan kerangka teoritis yang memandang tubuh sebagai arena politik dan disiplin sosial. Selain melalui regulasi perilaku, kontrol terhadap tubuh perempuan juga berlangsung melalui konstruksi standar kecantikan dan representasi tubuh ideal. Standar kecantikan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bekerja melalui internalisasi norma tubuh ideal, sehingga perempuan terdorong untuk menyesuaikan tubuh dan identitasnya dengan standar yang dianggap pantas secara sosial. Meskipun berangkat dari konteks masyarakat Barat, konsep ini relevan untuk membaca bagaimana standar tubuh dilegitimasi secara kultural dalam masyarakat Jawa sebagai bagian dari mekanisme disiplin sosial terhadap perempuan (Frederick et al., 2008: 145-146).

Dalam teori *Docile Bodies*, kekuasaan modern bekerja melalui mekanisme disiplin yang membentuk tubuh agar patuh terhadap norma sosial, tidak melalui kekerasan fisik, melainkan melalui pengawasan, penilaian moral, dan proses normalisasi. Dalam konteks perempuan Jawa, mekanisme disiplin ini tampak dalam pengaturan sikap, penampilan, dan perilaku tubuh yang dilekatkan sejak usia dini, sehingga perempuan diarahkan untuk secara sukarela menyesuaikan diri dengan standar kepantasan yang ditentukan oleh norma budaya dan relasi patriarki (Foucault, 1995: 137-138).

Persepsi yang berkembang dalam masyarakat Jawa merangkum konstruksi perempuan sering dirangkum dalam konsep *wani ditata* dan *wani nata*. *Wani ditata* merujuk pada posisi perempuan sebagai subjek yang kehidupannya berada dalam lingkup pengaturan sosial, mulai dari cara berpakaian, berbicara, hingga pengambilan keputusan. Sementara itu, *wani nata* menempatkan perempuan sebagai pendukung keputusan laki-laki, khususnya suami, demi menjaga harmoni keluarga. Konsep ini memperlihatkan bagaimana kepatuhan perempuan dinormalisasi sebagai nilai budaya (Nugroho, 2020: 5-6).

Sejalan dengan pandangan Foucault, disiplin terhadap tubuh perempuan berlangsung secara lebih intensif dibandingkan tubuh laki-laki, sehingga perempuan secara aktif mereproduksi standar feminitas yang mengekang melalui internalisasi norma sosial yang dianggap alamiah. Dengan demikian, pengaturan tubuh perempuan Jawa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tradisi budaya, melainkan sebagai praktik politik tubuh yang mereproduksi relasi kuasa patriarki melalui proses disiplin dan normalisasi sosial (Bartky, 1990: 64-65).

Pembagian Peran Domestik dan Publik Perempuan Jawa

Patriarki dan kapitalisme merupakan dua sistem yang saling berkelindan dalam membentuk relasi gender. Patriarki mengatur pembagian peran berbasis gender, sementara kapitalisme memanfaatkan pembagian tersebut untuk mempertahankan struktur ekonomi yang menguntungkan. Dalam konteks ini, perempuan ditempatkan terutama dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki didorong mendominasi ruang publik dan pengambilan keputusan. Patriarki berfungsi sebagai sistem yang memungkinkan laki-laki mengontrol dan mengambil keuntungan dari kerja domestik perempuan yang tidak diupah. Pembagian kerja berbasis gender ini tidak hanya merupakan konstruksi budaya, tetapi juga fondasi material yang menopang dominasi laki-laki dalam struktur sosial (Hartmann, 1981: 16). Dalam konteks perempuan Jawa, pembagian peran domestik yang dilegitimasi secara kultural memperkuat posisi perempuan sebagai penanggung utama kerja rumah tangga sekaligus membatasi akses mereka terhadap ruang publik dan pengambilan keputusan (Budiman, sebagaimana dikutip dalam Setiawan, 2018: 27). Pada tatanan hierarki, patriarki tidak hanya berdiri sendiri namun ada sistem kapitalisme yang bekerja sama untuk memposisikan perempuan sebagai pekerja domestik tidak diupah, namun disingkirkan dari pengambilan keputusan. Perspektif feminisme Marxis memandang penindasan perempuan sebagai hasil keterkaitan antara patriarki dan kapitalisme, di mana kerja reproduktif perempuan di ranah domestik tidak diakui sebagai kerja produktif, tetapi menjadi prasyarat bagi keberlangsungan sistem kapitalisme itu sendiri. Dalam struktur ini, kerja domestik perempuan dinormalisasi sebagai kewajiban alami, sementara kontribusinya dihapus dari perhitungan ekonomi dan sosial (Tong, 2010: 174).

Konsekuensi dari pembagian peran tersebut adalah munculnya beban ganda (double burden), di mana perempuan dituntut menjalankan kerja domestik sekaligus berpartisipasi dalam ranah publik. Ironisnya, perempuan yang mampu menjalankan kedua peran tersebut sering dipuji sebagai “perempuan ideal”, tanpa mempertanyakan ketimpangan struktural yang melatarbelakanginya. Dalam sistem kapitalisme, perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki merefleksikan relasi kuasa berbasis gender, di mana upah tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi kerja, tetapi juga sebagai penanda status sosial. Ketika perempuan memperoleh penghasilan lebih tinggi, kondisi tersebut kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap dominasi laki-laki, sehingga memunculkan stigma dan resistensi sosial dalam relasi domestik maupun publik (Hidayati, 2015: 112-114). Dampak dari kondisi ini adalah penguatan hierarki gender yang membatasi posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, sekaligus menormalisasi ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar.

Dengan demikian, patriarki dan kapitalisme tidak dapat dipahami sebagai dua sistem yang berdiri sendiri, melainkan sebagai struktur yang saling menopang. Pembagian kerja berbasis gender, normalisasi kerja domestik perempuan, serta ketimpangan upah menjadi mekanisme utama yang mereproduksi subordinasi perempuan. Dalam konteks perempuan Jawa, struktur ini

dilegitimasi melalui norma budaya dan nilai sosial yang menjadikan ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah.

Dalam kajian feminis kontemporer, relasi antara patriarki dan kapitalisme dipahami sebagai struktur yang saling menopang dan terus beradaptasi dalam konteks ekonomi modern, termasuk dalam masyarakat pascakolonial seperti Indonesia (Federici, 2018; Fraser, 2016: 100).

Pilihan Hidup Perempuan Jawa: Pendidikan, Pekerjaan, dan Pernikahan

Fase dewasa muda merupakan periode penting dalam kehidupan perempuan Jawa karena berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan mengenai pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Namun, fase ini tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan berada dalam tekanan norma budaya, relasi patriarki, dan tuntutan ekonomi yang saling berkelindan. Perempuan Jawa tidak hanya dihadapkan pada pilihan personal, tetapi juga pada ekspektasi keluarga dan lingkungan yang membingkai keputusan hidup mereka dalam kerangka kepatuhan terhadap peran gender yang telah dinormalisasi.

Dalam sistem kapitalisme, pasar tenaga kerja tidak bersifat netral terhadap gender, melainkan turut membentuk dan membatasi pilihan perempuan melalui mekanisme struktural dan kultural. Perempuan sering diarahkan pada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap sesuai dengan peran domestik dan stereotip femininitas, seperti pekerjaan dengan fleksibilitas tinggi atau upah rendah, sementara akses terhadap posisi strategis dan pekerjaan dengan pendapatan tinggi masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapitalisme bekerja bersamaan dengan patriarki dalam mereproduksi ketimpangan gender di ranah kerja dan mempersempit ruang pilihan perempuan Jawa.

Tubuh, Tekanan Sosial, dan Pilihan Hidup Perempuan Jawa

Penelitian ini melibatkan 50 responden perempuan Jawa yang diperoleh melalui survei daring menggunakan kuesioner terstruktur. Hasil survei menunjukkan bahwa tubuh dan penampilan perempuan masih menjadi objek komentar dan kontrol sosial. Sebanyak 42% responden (21 orang) menyatakan setuju bahwa penampilan perempuan sering dikomentari atau dikontrol oleh lingkungan sosial. Selain itu, 30% responden (15 orang) menyatakan pernah diminta mengubah cara berpakaian oleh lingkungan sosial atau keluarga.

Data juga menunjukkan bahwa 48% responden pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal maupun fisik di ruang publik maupun lingkungan kerja, sementara 28% menyatakan "mungkin" pernah mengalami hal serupa. Sebanyak 34% responden (17 orang) menyatakan setuju bahwa pernikahan dipandang sebagai mekanisme untuk mengatur atau mengendalikan kehidupan perempuan di lingkungan sosial mereka.

Sebanyak 17 responden mengungkapkan pengalaman tekanan patriarki dalam berbagai aspek kehidupan, terlepas dari status pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki masih melekat dalam kehidupan perempuan Jawa, terutama dalam konteks relasi keluarga. Dalam lingkungan domestik, perempuan, khususnya istri, kerap diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab dan beban peran yang lebih besar, sebagaimana ditunjukkan oleh 28% responden (14 orang) yang menyatakan tetap menanggung pekerjaan domestik meskipun juga bekerja penuh waktu.

Sebanyak 4 responden (8%) dalam jawaban terbuka mengungkapkan ketakutan untuk berkomitmen dalam hubungan serius karena khawatir pasangan bersikap patriarkis, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan mereka terkait pernikahan. Selain itu, terdapat tekanan

sosial yang menuntut perempuan untuk menikah pada rentang usia tertentu, khususnya setelah usia 25 tahun, sementara tuntutan serupa tidak diberlakukan secara setara terhadap laki-laki.

Pekerjaan, Upah dan Relasi Kuasa Gender

Hasil survei menunjukkan bahwa relasi kuasa gender masih mempengaruhi pengalaman perempuan Jawa dalam dunia kerja. Sebanyak 48% responden (24 orang) menyatakan setuju bahwa perempuan dengan gaji lebih tinggi dibandingkan laki-laki kerap memicu komentar negatif dari lingkungan sosial. Selain itu, 42% responden (21 orang) menyatakan setuju bahwa pemilihan pekerjaan perempuan seharusnya mempertimbangkan harapan keluarga atau masyarakat dibandingkan keinginan pribadi.

Sebanyak 46% responden (23 orang) juga menunjukkan adanya dorongan dari lingkungan atau keluarga agar perempuan lebih memprioritaskan pernikahan dibandingkan pendidikan atau pengembangan karier. Sementara itu, 36% responden (18 orang) menyatakan bahwa promosi dan posisi strategis lebih mudah diraih oleh laki-laki dibandingkan perempuan dalam lingkungan kerja mereka.

Pendidikan, Kepemimpinan dan Hambatan Struktural

Mayoritas responden berada pada rentang usia 25–34 tahun (90%), diikuti oleh responden berusia 17–24 tahun (4%), 35–44 tahun (4%), dan 45 tahun ke atas (2%). Berdasarkan tingkat pendidikan, responden didominasi oleh lulusan strata satu (S1) sebesar 74%, disusul oleh lulusan Diploma (10%), SMA/ sederajat (8%), dan strata dua (S2) sebesar 8%.

Berdasarkan status pekerjaan, responden didominasi oleh pekerja penuh waktu (68%), diikuti oleh ibu rumah tangga (16%), pekerja paruh waktu (6%), serta pelajar atau mahasiswa (4%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada dalam fase produktif dan memiliki keterlibatan aktif dalam dunia kerja.

Sebanyak 50% responden menyatakan setuju bahwa cara pandang sosial terhadap perempuan Jawa perlu diubah. Sementara itu, 6% responden menyatakan setuju bahwa pendidikan merupakan aspek utama yang harus diubah agar perempuan Jawa memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran kritis terhadap ketimpangan gender, meskipun perubahan struktural masih dianggap terbatas.

Pada pertanyaan terbuka mengenai perubahan peran perempuan Jawa dalam masyarakat modern, jawaban responden menunjukkan kecenderungan meningkatnya kesadaran gender. Sebagian responden menilai bahwa perempuan Jawa saat ini memiliki akses pendidikan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya, namun masih menghadapi resistensi budaya, terutama dalam konteks kepemimpinan dan keterlibatan dalam politik formal. Data kualitatif memperkuat temuan ini. Salah satu responden mengungkapkan pernah dipertanyakan mengapa melanjutkan kuliah jika ujungnya menjadi ibu rumah tangga, sementara responden lain menyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tekanan ekonomi keluarga yang menempatkan anak perempuan sebagai penanggung finansial. Bahkan responden yang berprestasi meraih beasiswa penuh dari kompetisi nasional tidak mendapat dukungan dari pasangannya karena capaian tersebut dianggap mengancam. Temuan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang secara formal lebih terbuka belum sepenuhnya membebaskan perempuan Jawa dari tekanan struktural yang membatasi pilihan mereka. Selain tekanan dalam pendidikan dan pekerjaan, data survei juga mengungkap adanya standar ganda moral yang bekerja secara asimetris. Beberapa responden mencatat bahwa perilaku yang sama seperti cara berpakaian atau

keputusan menunda pernikahan dinilai secara berbeda tergantung jenis kelamin pelakunya. Perempuan yang menunda pernikahan dianggap 'terlalu pemilih', sementara laki-laki dalam situasi serupa didorong untuk 'tidak terburu-buru agar tidak salah pilih'. Pola ini mencerminkan bagaimana norma sosial bekerja secara tidak setara dan mereproduksi subordinasi perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan Jawa dalam ranah tubuh, pekerjaan, dan pengambilan keputusan hidup dibentuk oleh kerja patriarki dan kapitalisme yang berakar secara historis. Konstruksi budaya dan struktur sosial yang terbentuk sejak periode pra-kolonial hingga kolonial terbukti tidak berhenti pada tataran sejarah, melainkan terus direproduksi dalam kehidupan perempuan Jawa kontemporer melalui norma sosial, relasi kerja, dan pembatasan pilihan hidup.

Analisis historis memperlihatkan bahwa tubuh dan peran perempuan Jawa sejak lama dimobilisasi sebagai instrumen politik dan sosial dari strategi kekuasaan kerajaan Mataram yang memanfaatkan tubuh perempuan sebagai alat penaklukan, hingga legitimasi kolonial yang membatasi akses pendidikan perempuan hanya pada kalangan priyayi untuk kepentingan domestik. Konstruksi historis ini terbukti bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan struktur yang aktif direproduksi. Stigma 'perawan tua' yang dialami responden kontemporer merupakan reproduksi dari konstruksi moral yang dilembagakan sejak masa keraton. Tekanan untuk memprioritaskan pernikahan di atas karier yang dirasakan 46% responden mencerminkan kelanjutan konsep macak, masak, manak yang dinormalisasi sejak periode kolonial. Sementara ketimpangan akses kepemimpinan yang dirasakan 36% responden merupakan reproduksi dari struktur patrimonial kerajaan yang tidak pernah menempatkan perempuan sebagai pemegang otoritas formal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan gender yang dialami perempuan Jawa tidak dapat dipahami sebagai persoalan individual atau kultural semata, melainkan sebagai hasil dari struktur historis dan sosial yang saling menopang. Pemahaman terhadap pengalaman perempuan Jawa perlu ditempatkan dalam kerangka kritis yang mempertimbangkan keterkaitan antara sejarah, budaya, dan struktur sosial yang membentuk relasi gender hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, K. B. (2017). *Ensiklopedi raja-raja dan istri-istri raja di tanah Jawa*. Surabaya: Media Pressindo.
- Al Huda, M. A. R. H., Kinanti, A. B., Dimisyqiyani, E., Aji, G. G., Amaliyah, A., & Sinulingga, R. A. (2026). Representasi kesadaran gender dan budaya patriarki Jawa melalui analisis naratif pada film *Kartini 2017*. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 9(1), 415–424. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i1.5656>
- Bartky, S. L. (1990). *Femininity and domination: Studies in the phenomenology of oppression*. Routledge.
- Bordo, S. (1993). *Unbearable weight: Feminism, Western culture, and the body*. University of California Press.
- Carey, P., & Houben, V. (2016). *Perempuan-perempuan perkasa di Jawa abad XVIII–XIX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dari, W., Pramudawardhani, I., and Andriyanto, A., Perjuangan dan Kegigihan Nyai Ageng Serang dalam Perang Diponegoro Tahun 1825-1830. *Keraton: Journal of History Education and Culture* 3.2 (2021): 85-102. <https://doi.org/10.32585/KERATON.V11i1.XXX>

- Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. *New Left Review*, 100, 99–117. <https://doi.org/10.64590/nt2>
- Federici, S. (2018). *Wages against housework*. New York: PM Press.
- Frederick, D. A., Peplau, A., & Lever, J. (2008). The Barbie Mystique: Satisfaction with Breast Size and Shape across the Lifespan. *International Journal of Sexual Health*, 20(3), 200–211. <https://doi.org/10.1080/19317610802240170>
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Hartmann, H. (1981). *The unhappy marriage of Marxism and feminism*. *Capital & Class*, 5(2), 1–33. <https://doi.org/10.1515/9781474472593-018>
- Hidayati, N. (2015). Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik). *Muwazah*, 7(2), 108–119. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i1.9032>
- Lailiyah N. A., & Purwaningsih, S. M. (2017). Pemikiran pendidikan perempuan pribumi Jawa dalam pers kolonial tahun 1908–1928. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Mardhiah, A., Rahmawati, N., & Sari, D. P. (2023). Emansipasi perjuangan Retna Pembayun dalam kisah heroik Mataram Islam di Kampung Purbayan. *Jurnal Sejarah dan Budaya, Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)* 6.1 (2024): 119-129. <https://doi.org:10.26555/jg.v6i1.9109>
- Moedjanto, G. (1987). *Konsep kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nashihah, B. H., & Maunah, B. (2025). Habitus patriarki dan kekerasan simbolik: Dekonstruksi stratifikasi gender dalam kosmologi Jawa tradisional. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 4(3), 530–537. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i3.6992>
- Nugroho, K. S. S. (2020). *Konco Wingking: Re-eksistensi citra, peran, & kehebatan wanita Jawa*. Yogyakarta: Lakeisha.
- Saptandari, P. (2013). *Gender dan budaya Jawa*. Modul perkuliahan. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.
- Septiana, D., et al. (2025). Kapitalisme dan patriarki: Perbandingan beban ganda perempuan pekerja formal. *Sahmiyya*, 12(2), 313.
- Setiawan, E. (2018). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam kancah panggung politik di Indonesia. *Muwazah*, 10(1), 27. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i1.9922>
- Tong, R. (2010). *Feminist thought: A more comprehensive introduction* (3rd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Widyaningsih. (2010). Persepsi orang tua terhadap nilai pendidikan anak perempuan pada masyarakat Jawa tradisional. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(1), 100–109.
- Yuliarni, S., Apriana, R., Heryati, E., & Badriah, S. A. (2020). Peranan prajurit perempuan (Korps Prajurit Estri) terhadap perkembangan ekonomi dan militer di Yogyakarta 1750–1810. Palembang: FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Yuniarti, E. S. (2018). Pendidikan bagi perempuan Jawa pada abad ke-19. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya*, 12(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.17977/um020v12i12017p30>